

# Lomba Solo HUT PGRI Ke- 76, Kabupaten Bogor Tampil Gemilang

**BOGOR**, (TB) – Lomba Solo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ke- 76 yang di gelar mulai 13 – 14 November 2021 di Hotel Grend Akila Kota Bandung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tampil Gemilang.

Menurut Ketua PGRI Cabang Ciawi, Wawan Setiawan, SP.d yang di dampingi, Adang Suryadi, S.Pd selaku Sekbid Seni Budaya dan Muhyidin, SP. d, MM selaku Sekbid Profesi, “kami merasa bangga atas prestasi yg di capai anak Didik kami dalam kegiatan lomba solo tersebut beberapa waktu lalu”.

Lebih lanjut di katakan, untuk lomba solo perwakilan kecamatan Ciawi Kabupaten dan lolos di tingkat Jabar yakni, Syiva Mauliddia Suryadi berasal dari PAUD Lestari 02 Kecamatan Ciawi, keluar sebagai Juara ke- III lomba Solo Putri Tingkat Jabar.

Sementara itu, Muh. Ifan asal SMAN 1 Cibinong, keluar sebagai juara harapan ke- 1 Lomba Solo Putra tingkat Jabar, ucapnya.

Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Amsohi, M. M.Pd, merasa bangga dan menyambut baik atas raihan prestasi yang di raih kedua anak Didik kami, dapat mengharumkan Kabupaten Bogor di Tingkat Provinsi Jabar, bahkan tingkat Nasional.

“Mudah- mudahan di tahun- tahun yang akan datang prestasi serupa lebih dapat di tingkatkan lagi, begitu juga anak Didik yang lain, bisa mengikuti jejak prestasi yang di raih kedua anak Didik kami tersebut”, harapnya. **(Muzni)**

---

# Diduga Memeras Anggota Polisi Ketum LSM DPP Tamperak

**JAKARTA, (TB)** – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat Antikorupsi (Tamperak) Kemas Panagean Pangaribuan diduga nekat memeras anggota polisi sebesar Rp2,5 miliar.

Kemas pun langsung dibekuk aparat Polres Metro Jakarta Pusat, Senin, 22 November 2021.

Hal itu pun diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi. “Kami baru saja tangkap ketua DPP LSM Tamperak, Kemas Panagean Pangaribuan, terkait tindak pidana pemerasan. Ditangkap karena mencoba memeras anggota Polri hingga Rp 2,5 miliar,” ungkapnya.

Disebutkan, Kemas dicituk polisi di Sekretariat Tamperak di Jl Palem V Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.00 WIB.

Kemas dicituk gegara memeras anggota Polsek Menteng. Ia menakut-nakuti anggota polisi dengan mencatut nama petinggi Polri hingga pejabat negara.

Kapolres menduga Kelas sudah sering melakukan pemerasan, tak hanya memeras di instansi Polri melainkan juga instansi lain.

“Pada saat terjadi pemerasan pun tersangka mengatakan jangan sampai saya buat seperti di tempat lain’, berarti dia sudah sering,” ujarnya.

Saat ini pelaku masih diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi masih mendalami keterangan pelaku.

(Hendrik)

---

# Ketua Ko-wappi Pesawaran Jalani Operasi Batu Empedu di Rumah Sakit Airan Raya

**BANDAR LAMPUNG,** (TB) – Dahron Sungkai (51) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan pelacak Profesional Indonesia ( DPD, KO-WAPPI ) Kabupaten Pesawaran, menderita sakit pada saluran empedu atau bisa di sebut dengan batu empedu, berhasil melewati masa kritis dari Operasi di Ruang Bedah Rumah Sakit Airan Raya Bandar Lampung, Senen ( 22/11/2021 ) Pukul 21.00 wib

Di katakan Ny Ormayati (50) sebagai Istri Dahron Sungkai kepada media tugasbangsa.com Sudah selama dua tahun ini menderita penyakit lambung,

” Suami Saya (Dahron) dua tahun yang lalu pernah dirawat Rs Mitra Husada Pringsewu, tapi masih di nyatakan penyakit lambung Maag Kronis ” Katanya.

Dijelaskanya, pada hari sabtu pagi mengambil rujukan melalui Puskesmas Kedondong dan di tujukan ke Rumah Sakit Arian Raya Di Bandar Lampung,

” Empat hari yang lalu penyakitnya kambuh kembali, terpaksa harus di rawat, Saya minta rujukan ke puskesmas kedondong memakai BPJS Rujukan ditujukan ke RS Arian Raya Bandar Lampung, dengan pelayanan RS yang cepat tanggap dan baik, sehingga suami saya mengidap penyakit saluran batu empedu, Oleh Dr. Imron Spesialis bedah penyakit dalam langsung di

adakan Operasi” Terangnya.

Hadir di Rs Arian Raya Dr (Can) Nurul Hidayah, SH.MH. Anton kurniawan, Mm. Siti rivngatin, SPd.i serta Anggota ko-wappi Pesawaran,

” Saya sangat mengapresiasi pelayanan RS Airan Raya, Dokter dan semua perawat-perawat cepat dan tanggap dalam bertugas melayani pasien, juga sekuriti nya juga baik-baik dalam menghadapi para pengunjung ” Pungkas Nurul Hidayah.

( Oby )

---

## **Pemerintah : Penerapan Level PPKM Berdasarkan Capaian Vaksinasi**

**JAKARTA, (TB)** – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM di luar Jawa-Bali pada 23 November sampai 6 Desember 2021. Penerapan level PPKM didasarkan pada persentase capaian vaksinasi Covid-19 di masing-masing daerah.

“Dosis vaksinasi yang kurang dari 50 persen dinaikkan menjadi 1 level PPKM. Jadi, terdapat 109 kabupaten/kota di PPKM level 3, kemudian 200 kabupaten/kota di level 2, dan 77 kabupaten/kota di level PPKM 1,” ucap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya selepas rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, pada Senin, 22 November 2021.

Airlangga menyebut bahwa secara keseluruhan, kasus aktif besar mencapai 8.126 kasus atau 0,19 persen dari total kasus. Jumlah tersebut sudah menurun dibandingkan puncak kasus sebelumnya.

Sedangkan, dari segi konfirmasi kasus mingguan, beberapa provinsi di Tanah Air mengalami peningkatan namun masih dalam level asesmen yang sama.

“Kalau kita lihat secara keseluruhan kasus aktif besar 8.126 atau 0,19 persen dari total kasus dan ini sudah turun dibandingkan puncaknya yang lalu hampir 98,58 persen. Kemudian kasus harian itu sebesar 365 kasus dalam 7 hari dan per 21 November 314 kasus, dan di luar Jawa-Bali sebesar 31,53 persen atau 99 kasus, dan Jawa-Bali 215 kasus,” ucap Menko Perekonomian.

Menko Perekonomian menuturkan, kasus reproduktif atau angka reproduktif kasus efektif di Indonesia masih di bawah satu. Namun, dalam dua pekan terakhir terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan.

“Di luar Jawa-Bali kita lihat bahwa kasus aktifnya ada 4.263 atau 52,46 persen dari kasus nasional sebesar 8.126. Kemudian kasus kematian itu setiap harinya sebesar 3,12 (persen) kemudian kesembuhannya sebesar 96,57 persen,” jelas Airlangga.

“Sumatra *\_recovery rate\_*-nya 96,2 (persen), *\_fatality rate\_*-nya 3,58 (persen), dan kemudian Nusa Tenggara *\_recovery rate\_*-nya 97,41 (persen), *\_fatality rate\_*-nya 2,35 persen. Kalimantan *\_recovery rate\_*-nya 96,75 persen dan *\_fatality rate\_*-nya 3,17 (persen). Kemudian, Sulawesi *\_recovery rate\_*-nya 97,22 (persen) dan *\_fatality rate\_*-nya 2,64 (persen). Maluku, Papua *\_recovery rate\_* 95,90 dan *\_fatality rate\_* 1,75,” lanjut Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 66,6 persen, atau sebesar Rp495,77 triliun dari Rp744,77 triliun.

“Di klaster kesehatan Rp135,53 triliun atau 63 persen. Untuk perlinsos Rp140 (triliun) atau 64 persen. Dukungan korporasi juga sudah meningkat dari Rp81,83 triliun atau 50,4 persen, insentif usaha sudah 99,4 persen atau Rp62,4 triliun,” ucap

Airlangga. (Red)

*Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden*

---

# **PT HIM Diduga Masukan Bukti Bodong, Nama Raja Alam Dicatut**

**BANDAR LAMPUNG**, (TB) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung kembali mengadakan persidangan lanjutan perkara No: 39/Pdt.G/2021/PTUN. BL tentang gugatan keluarga 5 (lima) keturunan Bandardewa terhadap HGU PT HIM pada hari Senin (22/11). Persidangan kali ini memasuki agenda penyerahan tambahan bukti dari para pihak dan mendengarkan Saksi dari pihak penggugat.

Pihak penggugat ialah Masyarakat lima keturunan Bandardewa yang masing-masing pilarnya diwakilkan oleh Ir Achmad Sobrie MSi (pilar Goeroe Alam), Drs Raden Musaleh (pilar Musa), Drs Mihsan Naim (pilar Raja Sakti), Arieyanto SH MH (pilar Raja Balak), serta Rulaini (pilar H. Madroes). Kelima pilar tersebut telah menguasai penyelesaian permasalahan kepada Ir Achmad Sobrie MSi., dengan kuasa hukum dari kantor hukum Justice Warrior kota Metro. Sedangkan para tergugat yakni tergugat I (ATR/BPN RI), tergugat II (BPN Tubaba) dan tergugat II intervensi PT Huma Indah Mekar (HIM).

Pada sidang kali ini, PT HIM diduga memasukkan bukti bodong. Hal tersebut terungkap ketika penyerahan bukti tambahan oleh tergugat II intervensi, khususnya HGU No 81. Kuasa hukum

tergugat II Intervensi tampak gelagapan, tidak bisa menunjukkan, saat ditanya hakim ketua terkait keberadaan Sertipikat HGU dimaksud.

Setelah menerima tambahan bukti, majelis hakim melanjutkan persidangan mendengar keterangan saksi. Penggugat menghadirkan tiga saksi fakta, diantaranya tokoh masyarakat Bandardewa, Herman RA. Ketua lembaga masyarakat adat Bandardewa, Ridwan. Serta Rustam.

Masing-masing saksi, Herman RA menjelaskan tentang Asal usul ahli waris, Ridwan ketua lembaga masyarakat adat Bandardewa menyampaikan tentang kronologis tanah ulayat dan Rustam menyampaikan tentang upaya pengiriman surat menyurat lima keturunan Bandardewa terkait tanah ulayat terhadap tergugat.

Setelah disumpah, seluruh saksi penggugat mengungkapkan apa yang diketahui, sesuai kesaksiannya mereka berhasil menyingkap misteri yang selama ini terselubung.

Seperti Herman bin Settan Raja Alam (Alm) contohnya, nama orangtuanya dicatut. Bermula, setelah menjawab pertanyaan secara konsisten dan spesifik dari tergugat II Intervensi terkait identitas orang tuanya, yakni Raja Alam. Akhirnya dengan percaya diri kuasa hukum PT HIM mengajak saksi Herman ke meja hakim untuk melihat dan mungkin berharap bukti yang dimiliki oleh pihaknya dikenali oleh saksi. Kepada Herman, Tergugat II Intervensi kemudian menunjukkan foto dalam pembayaran ganti rugi tanah atas nama Raja Alam yang notabene orang tuanya. Namun sayangnya, dengan tegas Herman menjawab foto tersebut bukanlah foto orang tuanya, dirinya bahkan samasekali tidak mengenali orang dalam foto dimaksud.

Sementara saksi Ridwan mengatakan bahwa ladang keluarga mereka di lahan lima keturunan Bandardewa, tiba-tiba dirampas oleh PT HIM. Dimasa orde baru kala itu mereka cuma bisa pasrah tidak berdaya.

Sedangkan saksi Rustam mengatakan bahwa dirinya yang diberikan

kepercayaan oleh Achmad Sobrie untuk mengantarkan surat menyurat ke kantor tergugat II. Disebutkan Rustam, dirinya telah sebanyak empat kali mengantarkan surat, menerima jawaban cuma satu kali, itupun jawabannya tidak substantif dengan isi surat. Sementara pihak tergugat II mengakui hanya menerima kiriman surat dari penggugat sebanyak dua kali, satu balasan surat sampai ke alamat rumah Achmad Sobrie, satu balasan lainnya di alamat yang sama dikembalikan oleh pihak kurir jasa pengiriman surat dengan alasan alamat tidak diketahui.

Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Yarwan SH MH., dengan didampingi oleh dua hakim anggota Andhy Matuaraja SH MH., dan Hj Suaida Ibrahim SH MH., serta Panitera pengganti Ida Meriati SH MH., berjalan dengan lancar dan mengikuti protokol kesehatan.

Sidang lanjutan pemeriksaan saksi akan dilanjutkan pada Rabu (24/11) dan Kamis (25/11) siang.

Mencermati perkembangan sidang, kuasa ahli waris 5 keturunan Bandardewa Ir Achmad Sobrie MSi memberikan tanggapannya melalui pesan WhatsApp, Selasa, (23/11).

Disampaikannya, bahwa Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa yang berhak, namun tidak menerima ganti rugi telah ditegaskan oleh Pertama, Kepala Kampung/Desa Bandardewa dalam surat tanggal 3 Maret 1983 No 020/kp/bd/1983 kepada Camat Tulangbawang Tengah. Kedua, Keterangan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dalam surat tanggal 29 Maret 1983 No. AG.200/393/dprd-Lu/1983 kepada Bupati KDH Tk II. Lampung utara.

Dan ketiga, Tidak terdapat dalam peta Rincikan PT HIM yang diduga direkayasa dan disusun oknum BPN Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun, lanjut Sobrie, Dokumen resmi yang diserahkan pihak PT HIM secara resmi kepada Komisi II DPR RI/Pokja pertanahan tahun 2005.

1) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 16/HGU/1989

tentang Pemberian hak guna usaha atas nama PT Huma Indah Mekar, Jakarta.

2) Sertipikat HGU 16 tahun 1994 luas 2.125,35 hektar didesa Bandardewa, Ujung Gunung Ilir, Panaragan dan Menggalamas masa berlaku hak 31 Desember 2019.

3) Sertipikat No 27 tahun 1996 luas 2.282 hektar di Desa Penumangan, Panaragan Jaya dan Ujung Gunung Udik, masa berlaku hak 31 Desember 2010.

Selain itu, Tanah 5 Keturunan Bandardewa dari seluas 1.470 hektar yang hanya masuk HGU dalam sertipikat 206 hektar, tetapi sisanya 1.200 hektar lebih dikelola oleh PT HIM. Surat Camat Tulangbawang Tengah tanggal 22 September 1998 No.593.49.16.1998 kepada Bupati Tulangbawang menjelaskan lahan yang dikelola PT HIM dari KM 133-138. Ini bersesuai dengan peta Rincikan PT HIM di lapangan yang ditanam karet. Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 27 Agustus 2008 merekomendasikan, agar BPN melakukan pengembalian batas bidang HGU dengan ukur ulang di lapangan paling lambat 10 Oktober 2008.

“Diduga adanya kolaborasi pihak PT HIM dengan oknum aparat pejabat BPN dan Pemkab Tulangbawang rekomendasi ukur ulang tersebut dijegal. Meskipun telah diprogramkan dananya sejumlah Rp 268 juta dalam APBD Kabupaten Tulangbawang TA 2008 dan APBD perubahan TA 2009,” urai Sobrie.

Setelah berhasil (pada kesempatan ke 1, tahun 2008), sambung dia, direktur PT HIM langsung mengajukan perpanjangan hak kepada Bupati Tulangbawang melalui surat tanggal 18 Desember 2008.

Bupati baru memberikan rekomendasi (setelah penjagalan ukur ulang kali ke 2 pada tahun 2009) berhasil dan kabupaten Tulangbawang mengalami Pemekaran daerah. Lahan 5 Keturunan Bandardewa masuk wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat.

Lebih lanjut Sobrie merincikan, Fakta persidangan online atas

jawaban tergugat I (BPN RI) tanggal 7 Oktober 2021 dalam perkara Nomor 39/G/2021/PTUN.BL halaman 19-20 telah membuka misterinya adanya Mafia Tanah di BPN atas Pencaplokan Lahan 5 Keturunan Bandardewa secara masif dalam proses perpanjangan HGU PT HIM No 16 tahun 1989 khususnya sertipikat No 16 tahun 1994 dengan adanya rekomendasi sebagai berikut. Pertama, Surat Bupati Tulangbawang tanggal 14 Desember 2009 No.593/457/1.03/TB/2009. Kedua, Surat kepala dinas perkebunan Provinsi Lampung tanggal 22 Desember 2009 No.525.26/139/D/2009. Ketiga, Surat Bupati Tulangbawang Barat tanggal 10 Juni 2010 No.593/81.A/I.01/tbb/2010. Keempatnya, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Lampung.

“Lima tahun kemudian, perpanjangan hak guna usaha tersebut 25 tahun dari 31 Desember 2019 menjadi berakhir 31 Desember 2044 baru diterbitkan secara rahasia. Dengan Keputusan kepala BPN RI No.35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 karena sedang dalam proses mediasi Komnas HAM untuk mencari solusi damai (win-win solution) yang telah disepakati bersama dalam rapat tanggal 23 April 2013 dipimpin komisioner Komnas HAM diikuti wakil Bupati Tulangbawang Barat, BPN kabupaten Tulangbawang, Asda Pemkesra, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kantor Pertanahan Tulangbawang Barat, PT HIM, DPRD Tulangbawang Barat dan 5 Keturunan Bandardewa,” beber Sobrie.

Selama 40 tahun berjuang melawan mafia tanah, masyarakat 5 keturunan Bandardewa melihat adanya harapan besar akan hadirnya negara dalam kasus ini, terlebih lagi setelah presiden Jokowi mengeluarkan instruksi pemberantasan mafia tanah.

“Saat inilah momentumnya yang sangat tepat, negara harus hadir dalam menegakkan hukum dan keadilan hak-hak bagi rakyat kecil. Sesuai dengan instruksi Presiden untuk memberantas Mafia Tanah,” pungkas Sobrie optimis.

( Dr )

---

# **Pra Konferensi Dua Kandidat Calon Ketua PWI Kabupaten Bogor Melakukan Deklarasi Damai**

**CIBINONG,** (TB) – Panitia Pelaksana (Panpel) Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor gelar deklarasi damai bagi kedua calon yang bakal memperebutkan kursi ketua tersebut, di kantor sekretariat PWI gedung Pusda'i Cibinong, Bogor.

Dalam sambutannya, ketua PWI Kabupaten Bogor, Achmad Indrawan mengatakan, perhelatan deklarasi damai yang sengaja diselenggarakan pihaknya, merupakan suatu agenda yang telah dirancang oleh Panpel konferensi PWI Kabupaten Bogor, sebagai salah satu kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilihan ketua PWI Bumi Tegar Beriman masa bakti 2021-2024.

“Deklarasi damai ini merupakan salah satu agenda kami di kepanitiaan konferensi sebelum acara utamanya dihelat pada 30 November 2021 bertempat di hotel Bigland Sentul, Kecamatan Babakan Madang,” kata Indrawan kepada Bogorupdate.com, Senin (22/11/21).

Ia menjelaskan, maksud dan tujuan diselenggarakannya agenda deklarasi damai terhadap dua calon yang bakal memperebutkan kursi ketua PWI Kabupaten Bogor di 3 tahun kedepan bertujuan, agar para calon yang masing-masing memiliki pendukung agar dapat sama-sama mensukseskan konferensi ke-5 ini saat acara

tersebut berlangsung.

“Ada simbolis penandatanganan saat deklarasi tadi yang telah sukses kami selenggarakan. Alhamdulillah, kedua calon yakni H. Subagiyo sebagai calon petahana dan Untung Bactiar dari wartawan Radar Bogor telah sepakat untuk sama-sama sportif agar tidak adanya ekses apapun saat perhelatan konferensi digelar,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Indrawan, selain penandatanganan deklarasi damai dari kedua calon, ada juga pemaparan visi dan misi dari kedua calon tersebut yang disampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota PWI Kabupaten Bogor yang hadir.

“Ada juga kesempatan yang kami berikan dalam penyampaian visi dan misi dari kedua calon yang didengarkan langsung oleh seluruh tamu undangan yang hadir di acara ini,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat PWI yang sekaligus ketua Koordinator Wilayah (Korwil) PWI Jawa Barat wilayah Bogor Raya, HRM, Danang Donoroso menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya deklarasi damai dari kedua calon yang dirancang oleh panitia pelaksana konferensi.

“Semoga, dengan adanya deklarasi ini penyelenggaraan konferensi pada 30 November 2021 nanti dapat berjalan sesuai harapan bersama tanpa ada ekses apapun,” imbau nya.

“Adapun, jangan sampai adanya perpecahan dari keanggotaan PWI kabupaten Bogor cuma hanya berbeda dukungan dari kedua calon yang ada. Karena PWI ini adalah organisasi untuk menyatukan seluruh pekerja pers yang berada di wilayah Bumi Tegar Beriman khususnya. Jangan sampai ada perpecahan, karena ini organisasi yang harus ada rasa memiliki bagi setiap anggotanya yang terdaftar,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pengurus PWI Kabupaten Bogor telah sepakat untuk membentuk suatu kepanitiaan dalam pelaksanaan konferensi PWI Kabupaten Bogor atau pemilihan ketua dan

pengurus organisasi tersebut di 3 tahun kedepan. Panitia pelaksana, yang diketuai oleh Achmad Indrawan Cs telah merancang persiapan konferensi dalam agenda rutin 3 tahunan tersebut, bertempat di hotel Bigland Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada 30 November 2021 nanti.

Dimana, untuk calon sendiri telah mengerucut dari 6 orang yang sebelumnya telah mengambil formulir bakal calon (Balon) kini hanya menyisihkan 2 calon diantaranya Untung Bachtiar wartawan senior dari Radar Bogor dan H. Subagiyo sebagai calon petahana yang bekerja di koran harian Internasional Media. (Red).

---

## **Viral Guru di Pulo Aceh Tak Ada Hadir Mengajar, APPA Dorong Pemprov Benahi Pendidikan**

**BANDA ACEH, (TB)** – Inisiator Angkatan Pemuda Peduli Aceh (APPA), Md. Sulthan Alfaraby, C.RM. C.PS., C.Pst, mengungkapkan kekecewaan dengan pendidikan di Pulo Aceh dan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh harus menyikapi masalah pendidikan dengan serius.

Hal ini diungkapkan terkait sebuah video viral yang menampilkan murid-murid yang beranjak pulang dari sekolah akibat guru di Pulo Aceh, Aceh Besar tidak masuk.

Dalam video itu memperlihatkan rekaman salah satu sekolah di Pulo Aceh. Para murid terlihat memakai pakaian Pramuka sembari

membawa tas dan juga buku.

Para murid mengakui bahwa mereka pulang sekolah pukul 10.00 WIB pagi. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada guru yang berhadir di sekolah.

“Pemprov harus segera bertindak dan menyikapi serius problem ini. Anak-anak kita di sana perlu bantuan. Karena jika tidak, akan berakibat terhadap masa depan pendidikan mereka di Pulo Aceh,” ujar dengan kecewa, Senin (22/11/2021).

Pihak Alfaraby sebelumnya pernah mendorong pemerintah untuk menyediakan Ambulance laut untuk problem kesehatan di sana, dan juga mendorong Pemprov untuk melakukan rekonstruksi pendidikan guna menempatkan tenaga pengajar yang selalu sedia berada di Pulo Aceh untuk menjamin kualitas pendidikan di sana.

“Ini jangan sampai berlarut-larut apalagi bertahun-tahun tenaga pengajar jarang berhadir. Kita mendorong ini menjadi perhatian guna menempatkan tenaga pengajar yang selalu stay dan juga dilakukan pengawasan yang berkala agar kejadian ini tidak berulang,” ungkapnya.

Seperti dilansir Detikcom, salah seorang Camat di Pulo Aceh, bernama Mawardi, berujar bahwa kondisi seperti ini sering terjadi akibat para pengajar bukan merupakan warga asli kepulauan atau warga lokal.

“Di sini ada guru PNS, kontrak dan honorer juga ada. Tapi kondisi kadang tidak ada guru di sekolah sudah terjadi bertahun-tahun,” kata Mawardi.

Berdasarkan informasi, ada dua pulau yang dihuni masyarakat di Kecamatan Pulo Aceh, yakni Pulau Breuh dan Pulau Nasi. Di Pulau Breuh terdapat lima sekolah dasar (SD), satu SMP dan satu SMA.

Selain itu, ada tiga SD, satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri

(MIN), satu SMP serta satu SMA di Pulau Nasi. Mawardi mengaku dirinya kerap mendapat laporan dari warga terkait tidak adanya pengajar di sekolah terutama tingkat SD. (Red)

---

## **Bupati Bogor Hadiri Konferensi Nasional Geopark Indonesia II Secara Virtual**

**CIBINONG**, (TB) – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri Konferensi Nasional Geopark Indonesia ke-2 tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (22/11/2021). Pada kesempatan tersebut, Ade Yasin didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bogor, Kepala Bappedalitbang, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor lainnya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka pengembangan dan konservasi geopark.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam arahannya menjelaskan, geopark bukan saja tempat konservasi, tapi juga bisa dikembangkan untuk edukasi dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar melalui geowisata, sehingga menjadi keseimbangan antara konservasi lingkungan dengan pemanfaatannya, untuk pengembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kawasan geopark adalah tempat belajar tentang warisan bangsa di dunia. Belajar tentang keragaman geologi, belajar tentang keragaman hayati, serta belajar tentang keragaman budaya. Semua keragaman dan kekayaan yang kita miliki, harus kita jaga dan lindungi, sehingga tidak dieksploitasi secara berlebihan,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, geopark juga bisa dikembangkan menjadi tempat geowisata yang menarik. Dimana wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam secara geologi dan keragaman budaya, tapi juga bisa ikut terlibat untuk mengkonservasi lingkungan. Saya melihat geopark cocok dengan tren pariwisata di masa pandemi.

“Kunci utama yang menentukan keberhasilan pengembangan geopark adalah tata kelola yang semakin baik. Tata kelola harus terus diperbaiki, libatkan penggiat geopark, akademisi, dan masyarakat sekitar. Lahirkan gagasan yang inovatif, lakukan terobosan-terobosan yang dapat menyeimbangkan antara konservasi dengan ekonomi,” ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi berharap semua menjadi bagian dari konservasi geopark. Sekaligus melakukan upaya untuk memperkuat masyarakat sekitarnya untuk mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi pariwisata, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, Konferensi Nasional Geopark Indonesia merupakan bentuk kolaborasi antara kementerian/lembaga dalam keanggotaan Komite Nasional Geopark Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh pengelola geopark.

“Penyelenggaraan Konferensi Nasional Geopark Indonesia yang kedua ini bertujuan mengakselerasi dan menggali pemahaman, sinergitas pengembangan geopark melalui kebijakan, menggali masukan-masukan dan upaya mencari solusi atas masalah pengembangan geopark, serta sosialisasi pengembangan geopark. Selanjutnya, memperkuat jejaring hubungan pemerintah, akademisi, pelaku dunia usaha, media, masyarakat, dan pengelola, agar terbentuk sinergitas secara optimal dalam pembangunan geopark,” ujar Suharso.

Suharso menambahkan, Indonesia punya Geopark Batur, geopark pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai Unesco Global

Geopark (UGG) pada tahun 2012. Selanjutnya ada Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh, Geopark Gunung Rinjani, Geopark Danau Toba, dan sebagainya, yang sudah diakui menjadi UGG. Dengan pencapaian tersebut, Indonesia kini menempati peringkat ke-8 dari 44 negara di dunia. (Sto/HMS)

---

## **Presiden Jokowi Dorong Peningkatan Kerja Sama ASEAN-RRT**

**JAKARTA, (TB)** – Selama 30 tahun ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bermitra, sudah banyak kerja sama konkret yang dilakukan kedua kawasan, termasuk di bidang ekonomi. RRT bahkan menjadi mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 12 tahun terakhir.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Khusus untuk Memperingati 30 Tahun Hubungan ASEAN-RRT secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 22 November 2021.

“Perdagangan kita di tahun 1991 bernilai USD8,36 miliar dan tahun lalu mencapai lebih dari USD685,28 miliar, meningkat 82 kali lipat hanya dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun,” ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, investasi kumulatif dua arah juga telah melampaui USD310 miliar selama 30 tahun terakhir sehingga menempatkan RRT sebagai sumber FDI keempat terbesar dari seluruh mitra wicara ASEAN.

Menurut Presiden Jokowi, hubungan kuat yang terjalin antara ASEAN-RRT membutuhkan kerja keras, salah satunya dengan membangun kepercayaan agar terbangun kemitraan yang lebih kokoh dan saling menguntungkan 30 tahun mendatang.

“Rasa saling percaya itu dapat terwujud jika kita semua menghormati hukum internasional,” ungkapnya.

Kemitraan ASEAN-RRT, lanjut Presiden Jokowi, perlu diperkokoh untuk menjadikan kawasan sebagai *economic powerhouse*. Perdagangan yang seimbang juga sangat penting untuk terus diupayakan.

“Oleh karena itu kerja sama untuk mendukung transisi ekonomi, transisi energi, dan transisi digital menjadi sangat penting bagi kerja sama ke depan,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden mengatakan bahwa ASEAN-RRT memiliki tanggung jawab untuk menjadikan kawasan yang damai dan stabil. Presiden Jokowi meyakini bahwa tanpa perdamaian dan stabilitas maka tidak akan ada kemakmuran.

“Mari kita perkuat kerja sama *to recover together, recover stronger*,” tandasnya.

“Saya ucapkan selamat 30 tahun ASEAN-RRT. Saya yakin, kemitraan strategis komprehensif akan mengantarkan kita pada lompatan besar bagi kemajuan hubungan ASEAN-RRT kedepan,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro, dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN Derry Aman.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

---

# Manfaatkan DD Pekon Tanjung Agung Bangun Drainase

**TANGGAMUS**, (TB) – Kepala Pekon Tanjung Agung Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus Rahmad Ramadan Bahu membahu membantu pembuatan Drainase yang sumber anggarannya dari (DD) Anggaran Dana Desa/Pekon, Kamis(18/11/2021)

Kepala Pekon Tanjung Agung , Rahmad Ramadan Mengatakan dalam pembuatan Drainase ini yang berlokasi di pedukuhan Dusun 3 Sinar Komerling Pekon Tanjung Agung, pembangunan drainase ini merupakan usulan dan permintaan dari masyarakat setempat, lahan yang ber ukuran dengan panjang 110 dan memiliki kedalaman dan lebar 70,

“Drainase ini merupakan kebutuhan dalam sektor saluran air pemukiman warga yang program ini merupakan aspirasi masyarakat dusun 3 sinar komering Pekon tanjung agung yang disampaikan melalui musyawarah dusun, musyawarah pekon sehingga dijadikan realisasi pembangunan pekon untuk tahun anggaran 2021 manfaat pembangunan drainase adalah sebagai sarana untuk memperlancar aliran air baik di musim kemarau maupun di musim penghujan.

Salah satu masyarakat pekon Tanjung Agung Sobirin mengatakan dia sangat berterimakasih dengan adanya drainase ini sangat membantu karena terkadang hujan deras sering sekali longsor jika tidak cepat ditangani ini akan berdampak longsor yang bisa menyeret rumah warga dengan kemiringan kurang lebih 30 Derajat,

Dalam pembuatan drainase ini yang bersumberkan dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2021 ini mengeluarkan biaya sejumlah Rp.87.307.000 Tutupnya. (**Holita/Red**)